

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.1.1 Akuntansi	12
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi	12
2.1.1.2 Fungsi Akuntansi	13

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi.....	14
2.1.1.4 Bidang-Bidang Akuntansi.....	15
2.1.2 Pengawasan Intern	18
2.1.2.1 Pengertian Pengawasan.....	18
2.1.2.2 Pengertian Pengawasan Intern	19
2.1.2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	21
2.1.2.4 Jenis-jenis Pengawasan.....	23
2.1.2.5 Indikator-Indikator Pengawasan dan Langkah-langkah dalam Proses Pengawasan	25
2.1.2.6 Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Inspektorat Daerah.....	28
2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi.....	30
2.1.3.1 Pengertian Sistem.....	30
2.1.3.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.....	31
2.1.3.3 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi.....	32
2.1.3.4 Komponen Sistem Informasi Akuntansi.....	34
2.1.3.5 Kualitas Sistem Informasi Akuntansi	40
2.1.4 Kinerja Pemerintahan	41
2.1.4.1 Pengertian Kinerja Pemerintah	41

2.1.4.2 Aspek Kinerja	42
2.1.4.3 Kinerja Aparatur	44
2.1.4.4 Arti Penting Kinerja Pemerintah Daerah	44
2.1.4.5 Indikator Kinerja Pemerintah.....	45
2.1.4.6 Teori Akuntabilitas Publik.....	47
2.1.4.7 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	48
2.1.5 Hubungan Pengawasan Intern dengan Kinerja Pemerintahan	50
2.1.6 Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dengan Kinerja Pemerintahan.....	51
2.1.7 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	52
2.2 Kerangka Pemikiran.....	55
2.3 Hipotesis Penelitian.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Metode Penelitian yang Digunakan	60
3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	61
3.2.1 Definisi Variabel.....	61
3.2.2 Operasionalisasi Variabel	62
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	64
3.3.1 Populasi.....	64
3.3.2 Sampel	64
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	65
3.4.1 Sumber Data	65

3.5 Teknik Pengumpulan Data	66
3.6 Teknik Analisis Data	67
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	67
3.6.2 Pengaruh Pengawasan Intern (X1) terhadap Kinerja Pemerintahan (Y) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	69
3.6.3 Pengaruh Sistem informasi akuntansi (X2) terhadap Kinerja Pemerintahan (Y) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	71
3.6.4 Pengaruh pengawasan intern (X1) dan penerapan sistem informasi akuntansi (X2) terhadap kinerja pemerintahan (Y) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	74
3.7 Tempat dan Waktu Penelitian	77
3.7.1 Tempat Penelitian	77
3.7.2 Waktu Penelitian.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	79
4.1 Hasil Penelitian	79
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	79
4.1.1.1 Profil Singkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	79
4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan	

Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	80
4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	82
4.1.1.4 Isu Strategis.....	82
4.1.2 Karakteristik Responden.....	85
4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	87
4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas	87
4.1.3.2 Uji Multikolonialitas.....	88
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	89
4.1.4 Deskripsi Variabel yang Diteliti	90
4.1.4.1 Hasil Penelitian mengenai Pengawasan intern pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	90
4.1.4.2 Hasil Penelitian mengenai Penerapan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	103
4.1.4.3 Hasil Penelitian mengenai kinerja pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	113
4.1.5 Hasil Uji Hipotesis.....	127
4.1.5.1 Pengaruh Pengawasan intern terhadap Kinerja pemerintahan.....	127
4.1.5.2 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja pemerintahan.....	131

4.1.5.3 Pengaruh Pengawasan intern dan Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap Kinerja pemerintahan.....	135
4.2 Pembahasan.....	145
4.2.1 Pengaruh Pengawasan intern terhadap Kinerja pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	145
4.2.2 Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja Pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	147
4.2.3 Pengaruh Pengawasan intern dan Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap Kinerja pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	149
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	152
5.1 Simpulan.....	152
5.2 Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	3
Tabel 1.2	Capaian Kinerja Tahun 2021 (Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2021).....	4
Tabel 1.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	5
Tabel 1.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	6
Tabel 1.5	LHE Implemantasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020.....	6
Tabel 2.1	Komponen Sistem Informasi Akuntansi	35
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	52
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	61
Tabel 3.2	Populasi Penelitian	64
Tabel 3.3	Purposive Sampling.....	65
Tabel 3.4	Skala Penilaian	67
Tabel 3.5	Interpretasi dari Besarnya Koefisien Korelasi X1 dengan Y	70
Tabel 3.6	Agenda Kegiatan Penelitian	78
Tabel 4.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
Tabel 4.2	Profil Responden Berdasarkan Usia.....	86
Tabel 4.3	Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	87
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas Instrumen	88
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolonialitas.....	89
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	90

Tabel 4.7	Pedoman Interpretasi tentang Pengawasan intern.....	91
Tabel 4.8	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai	92
Tabel 4.9	Pimpinan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.....	92
Tabel 4.10	Pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku	93
Tabel 4.11	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.....	94
Tabel 4.12	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.....	94
Tabel 4.13	Lembaga sudah memiliki prosedur kerja yang jelas sehingga dapat mengurangi potensi penggelapan dan kesalahan, seperti prosedur kerja membentuk sistem	95
Tabel 4.14	Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian.....	96
Tabel 4.15	Semua transaksi yang dientri dan diproses kedalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi....	96
Tabel 4.16	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik.....	97
Tabel 4.17	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan	

memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat	98
Tabel 4.18 Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.....	98
Tabel 4.19 Terdapat sistem pencatatan yang memadai terkait dengan proses pengalokasian anggaran	99
Tabel 4.20 Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.....	100
Tabel 4.21 Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur anggaran	100
Tabel 4.22 Instansi sudah melakukan pengawasan khusus baik secara rutin maupun mendadak terkait aktivitas alokasi anggaran	101
Tabel 4.23 Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Pengawasan Intern	101
Tabel 4.24 Pedoman Interpretasi tentang Pengawasan intern.....	104
Tabel 4.25 Sistem informasi akuntansi sudah dioperasikan menggunakan spesifikasi komputer yang tepat.....	105
Tabel 4.26 Pegawai memiliki pengetahuan yang baik mengenai	

hardware pada sistem informasi akuntansi.....	105
Tabel 4.27 Software operasional sistem informasi akuntansi mudah dipahami oleh pegawai.....	106
Tabel 4.28 Software operasional sistem informasi akuntansi meringankan beban kerja pegawai	107
Tabel 4.29 Sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam instansi tidak pernah ada gangguan.....	107
Tabel 4.30 Pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada instansi sesuai dengan maksud penerapannya.....	108
Tabel 4.31 Prosedur penggunaan sistem informasi akuntansi memudahkan semua pegawai.....	109
Tabel 4.32 Terdapat prosedur tertulis yang jelas mengenai sistem informasi akuntansi	109
Tabel 4.33 Database sistem informasi akuntansi telah diotorisasi	110
Tabel 4.34 Database sistem informasi akuntansi tersimpan dengan aman	110
Tabel 4.35 Dukungan jaringan komunikasi memperlancar operasional sistem informasi akuntansi.....	111
Tabel 4.36 Hampir tidak pernah ada gangguan jaringan komunikasi..	112
Tabel 4.37 Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Penerapan sistem informasi akuntansi	112
Tabel 4.38 Pedoman Interpretasi tentang Kinerja Pemerintahan	115
Tabel 4.39 Setiap program kerja yang dilaksanakan dan dikelola	

secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan anggaran	115
Tabel 4.40 Kejelasan sasaran anggaran suatu program dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.....	116
Tabel 4.41 Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD ...	116
Tabel 4.42 Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu kinerja instansi pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa terjadi penumpukan tugas.....	117
Tabel 4.43 Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik	118
Tabel 4.44 Dalam penyusunan RKA-SKPD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri	118
Tabel 4.45 Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan	119
Tabel 4.46 Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip- prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.....	120

Tabel 4.47 Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program	121
Tabel 4.48 Banyaknya tugas pemeriksaan kinerja keuangan pemerintah membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menyelesaikannya.....	121
Tabel 4.49 Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan	122
Tabel 4.50 Setiap program kerja yang dilaksanakan dan dikelola secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan dan dengan melibatkan masyarakat	123
Tabel 4.51 Program kerja yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik	124
Tabel 4.52 Masyarakat merasakan langsung manfaat dari program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.....	124
Tabel 4.54 Rekapitulasi Jawaban Responden tentang kinerja pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	125
Tabel 4.55 Nilai Perhitungan Korelasi Pengawasan intern terhadap Kinerja pemerintahan	127
Tabel 4.56 Nilai Perhitungan Korelasi Penerapan sistem informasi akuntansi terhadap Kinerja pemerintahan	131

Tabel 4.57 Rekapitulasi data Pengawasan intern, Penerapan sistem informasi akuntansi dan Kinerja pemerintahan.....	136
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Langkah-langkah dalam proses pengawasan.....	
	26
Gambar 2.2	Pradigma Penelitian.....	
	58
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	
	81